

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 14, NO. 1, JUNI 2023

ISSN: 2086-6313

**DETERMINAN REALISASI PMDN DI INDONESIA: ESTIMASI PANEL DINAMIS**

*Vita Kartika Sari dan Yozi Aulia Rahman*

**CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA:  
ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL**

*Sifa Rofatunnisa dan Hardius Usman*

**AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS  
PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT**

*Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik*

**THE ROLE OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND TO IMPROVE THE PUBLIC SERVICE  
IN THE PAPUA PROVINCE**

*Ari Mulianta Ginting*

**DAMPAK KETERGANTUNGAN SOSIAL EKONOMI DESA TERHADAP LUASAN HUTAN MANGROVE  
DI INDONESIA**

*Itfan dan Widyono Soetjipto*

**ANALISIS TINGKAT KRIMINALITAS YANG MENGANCAM INDUSTRI MIKRO DAN KECIL**

*Agung Riyardi dan Maulidyah Indira Hasmarini*

**PENINGKATAN KEMISKINAN PERKOTAAN, SUBURBAN, DAN PERDESAAN  
PADA AWAL PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KENDAL**

*Rasyid Widada, Baba Barus, Bambang Juanda, dan Sri Mulatsih*

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 14, NO. 1, JUNI 2023

ISSN: 2086-6313

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii-xiv
<b>DETERMINAN REALISASI PMDN DI INDONESIA: ESTIMASI PANEL DINAMIS</b> <i>Vita Kartika Sari dan Yozi Aulia Rahman</i> .....	1-13
<b>CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA: ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL</b> <i>Sifa Rofatunnisa dan Hardius Usman</i> .....	15-32
<b>AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT</b> <i>Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik</i> .....	33-45
<b>THE ROLE OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND TO IMPROVE THE PUBLIC SERVICE IN THE PAPUA PROVINCE</b> <i>Ari Mulianta Ginting</i> .....	47-60
<b>DAMPAK KETERGANTUNGAN SOSIAL EKONOMI DESA TERHADAP LUASAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA</b> <i>Itfan dan Widyono Soetjipto</i> .....	61-75
<b>ANALISIS TINGKAT KRIMINALITAS YANG MENGANCAM INDUSTRI MIKRO DAN KECIL</b> <i>Agung Riyardi dan Maulidyah Indira Hasmarini</i> .....	77-90
<b>PENINGKATAN KEMISKINAN PERKOTAAN, SUBURBAN, DAN PERDESAAN PADA AWAL PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KENDAL</b> <i>Rasyid Widada, Baba Barus, Bambang Juanda, dan Sri Mulatsih</i> .....	91-107

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

## KATA PENGANTAR

Seiring dengan berubahnya nama Pusat Penelitian menjadi Pusat Analisis Keparlemenan maka Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (Jurnal EKP) saat ini berada di bawah manajemen para Analis Legislatif pada Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA). Namun, sistem pengelolaan dan proses seleksi naskah jurnal tidak mengalami perubahan. Artinya, secara substansi kualitas tulisan diharapkan terus menjadi lebih baik, seiring dengan penguatan dukungan Analis Legislatif kepada DPR RI.

Jurnal EKP edisi Juni 2023 masih tetap menyapa para pembaca termasuk Anggota DPR RI dan pemerhati masalah ekonomi dan kebijakan publik lainnya dengan berbagai topik tulisan. Pada edisi kali ini, terdapat 7 tulisan yang telah diseleksi secara cermat oleh Tim Redaksi dengan dukungan minimal 2 (dua) Mitra Bestari untuk setiap tulisannya. Mitra Bestari baik akademisi maupun praktisi, tentunya memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai di bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Topik tulisan pertama adalah mengenai “Determinan Realisasi PMDN di Indonesia: Estimasi Panel Dinamis”, oleh *Vita Kartika Sari dan Yozi Aulia Rahman*. Kedua penulis menyimpulkan bahwa strategi kebijakan investasi diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor produktif di daerah provinsi. Pusat dan provinsi juga diminta untuk terus meningkatkan koordinasi agar alokasi PMDN benar-benar efisien untuk sektor-sektor unggulan daerah.

Tulisan kedua membahas mengenai “Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketimpangan Gender di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel”, oleh *Sifa Rofatunnisa dan Hardius Usman*. Tulisan ini menyimpulkan rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan dan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang SMP signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Kemudian topik ketiga ditulis oleh *Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik* tentang “Akuntabilitas dan Kondisi Keuangan Daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat”. Disimpulkan bahwa kebijakan transfer dana ke daerah otonomi khusus perlu dibenahi khususnya terhadap penggunaan atau pemanfaatan DAK oleh daerah yang belum memperoleh WTP atas hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI.

Tulisan keempat ditulis oleh *Ari Muliarta Ginting* dengan judul “The Role of Special Autonomy Fund to Improve the Public Service in the Papua Province”. Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa syarat Pemprov.Papua untuk menggunakan DOK tersebut, yakni partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan DOK, akuntabilitas pemprov dalam menggunakan DOK, dan pemerintah pusat harus dapat memastikan bahwa DOK dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan tulisan kelima adalah mengenai “Dampak Ketergantungan Sosial-Ekonomi Desa terhadap Luasan Hutan mangrove di Indonesia” ditulis oleh *Itfan dan Widyono Soetjipto*. Kedua penulis menjelaskan bahwa masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, termasuk hutan mangrove memberikan dampak negatif terhadap ekosistem hutan mangrove. Desa-desa yang wilayahnya sangat berdekatan dengan hutan mangrove atau di sekitar hutan mangrove memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan tersebut. Dampak negatifnya adalah luasan hutan mangrove cenderung semakin sedikit/kecil.

Tulisan selanjutnya adalah tentang “Analisis Tingkat Kriminalitas yang mengancam Industri Mikro dan Kecil”, yang ditulis oleh *Agung Riyardi dan Maulidiah Indira Hasmarini*. Kedua penulis menjelaskan bahwa semua model menggambarkan IMK terancam karena tingkat kriminalitas dari tenaga kerja di IMK dan di masyarakat umum yang memengaruhi kinerja IMK tersebut.

Sedangkan tulisan terakhir adalah berjudul “Peningkatan Kemiskinan Perkotaan, Suburban dan Pedesaan pada Awal Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal”, oleh *Rasyid Widada, dkk*. Disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 juga meningkatkan kemiskinan di Kabupaten Kendal. Hal ini lebih khusus lagi terjadi pada wilayah perkotaan yang dampaknya lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan. Isu-isu kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah suburban dan cenderung bersifat mengelompok terutama pada rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal.

Dengan terbitnya Jurnal EKP edisi Juni 2023 dengan berbagai topik yang dibahas, kiranya jurnal ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi semua pembaca, khususnya bagi Anggota DPR RI. Selain itu, semoga tulisan-tulisan pada Jurnal EKP dapat memberikan sumbangsih bagi proses pengambilan keputusan baik bersifat lokal maupun nasional.

Akhir kata, Redaksi Jurnal EKP mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berupaya menyumbangkan pemikiran yang terbaik, dan juga kepada para Mitra Bestari yang juga memberikan masukan dan pendapat atas substansi dari seluruh tulisan yang diseleksi.

Sekian dan Terima kasih. Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2023  
Redaksi

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 14, NO. 1, JUNI 2023

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

**Vita Kartika Sari** (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret) dan **Yozi Aulia Rahman** (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang)

## **DETERMINAN REALISASI PMDN DI INDONESIA: ESTIMASI PANEL DINAMIS**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 1-13

### **Abstrak**

Investasi merupakan variabel penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Investasi merupakan alat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui stimulus modal untuk proses produksi yang akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi dapat berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup. Pemberdayaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) perlu digalakkan sebagai sumber pembangunan yang penting. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, dan lama sekolah terhadap realisasi PMDN pada 33 provinsi di Indonesia periode 2016-2020. Realisasi PMDN di Indonesia menunjukkan tren positif, hal ini sebagai indikator terjadinya pertumbuhan investasi yang baik di level provinsi. Estimasi data menggunakan *first difference panel generalized method of moments*. Berdasarkan hasil pengujian, variabel PDRB terbukti signifikan positif terhadap PMDN. Variabel lama sekolah terbukti berdampak negatif terhadap realisasi PMDN. Variabel PDRB(1) dan belanja pemerintah terbukti insignifikan. Pengujian validitas instrumen dengan uji Sargan menunjukkan model penelitian valid. Melalui uji Arellano-Bond Serial Correlation, diketahui tidak terdapat serial korelasi sehingga model memiliki konsistensi yang baik. Strategi kebijakan investasi diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor produktif di level provinsi. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk dapat mengalokasikan PMDN secara efisien untuk sektor-sektor unggulan daerah.

Kata kunci: PMDN, PDRB, panel GMM

Sifa Rofatunnisa dan Hardius Usman (Politeknik Statistika STIS)

**CAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA:  
ANALISIS PERSAMAAN SIMULTAN DATA PANEL**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 15-32

**Abstrak**

Indonesia masih menghadapi masalah laju penurunan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan selama periode 2015-2019. Salah satu strategi yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan *Human Development Report*, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan Indeks Ketimpangan Gender tertinggi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan terhadap pencapaian inklusivitas pertumbuhan ekonomi dengan melihat pola simultanitas antara keempat indikator pertumbuhan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama periode 2015-2019. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah EC2SLS (*Error Component Two Stage Least Square*). Pola simultanitas yang terjadi memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia belum inklusif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki dan rata-rata upah perempuan signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan kesempatan kerja dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki signifikan menurunkan kemiskinan. Rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang pendidikan SMP signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi inklusif, ketimpangan gender, persamaan simultan, EC2SLS

Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik (Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia)

**AKUNTABILITAS DAN KONDISI KEUANGAN DAERAH OTONOMI KHUSUS  
PADA PROVINSI ACEH, PAPUA, DAN PAPUA BARAT**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 33-45

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan kondisi keuangan tiga daerah otonomi khusus (otsus), yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat dengan akuntabilitas keuangan daerah yang diprosikan oleh variabel opini laporan keuangan daerah hasil pemeriksaan BPK RI. Menggunakan metode *Conditional Logistic Fixed Effect*, penelitian ini menggunakan rasio keuangan berdasarkan data keuangan daerah tahun 2011-2019. Hasil penelitian adalah adanya hubungan antara akuntabilitas dengan kondisi keuangan pemerintah daerah otsus. Variabel yang konsisten mendorong terciptanya akuntabilitas adalah variabel rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi total dana transfer. Rasio Dana Bagi Hasil (DBH) per total pendapatan serta belanja operasi dan belanja modal per total belanja konsisten dan signifikan dalam mengurangi kemungkinan terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seluruh temuan ini sejalan dengan pengembangan perhitungan yang juga menggunakan *marginal effect ordered logit* untuk melihat persentase kemungkinan keterjadian opini dan hubungannya dengan berbagai rasio yang menjadi variabel penelitian. Berbagai temuan berdasarkan olah data dan perhitungan *marginal effect* menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan kebijakan DBH dan belanja daerah, serta penerapan DAK pada daerah yang belum memperoleh opini WTP.

Kata kunci: desentralisasi asimetris, kondisi keuangan daerah, akuntabilitas



**Ari Mulianta Ginting** (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI)

**PERANAN DANA OTONOMI KHUSUS UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI PAPUA**  
*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 47-59

**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji peran dana otonomi khusus (otsus) terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menggunakan data panel dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2013-2020, temuan kami didasarkan pada data panel. Dana otsus berdampak positif dan signifikan terhadap pelayanan publik baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Selain itu, kami mengidentifikasi desentralisasi fiskal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dana otsus merupakan prasyarat untuk peningkatan pelayanan publik. Ada persyaratan untuk melaksanakan dana khusus untuk Papua, seperti partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana khusus, akuntabilitas pemerintah daerah untuk menggunakan dana khusus, sinergi, dan koordinasi para pemangku kepentingan di Papua. Terakhir, pemerintah pusat harus memastikan dana khusus harus dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor kesehatan dan pendidikan. DPR RI perlu mendorong pengawasan dan evaluasi terhadap dana otonomi khusus di Provinsi Papua agar sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut.

Kata kunci: kebijakan fiskal, ekonomi regional, ekonomi publik, ekonomi regional, Dana Otonomi Khusus Papua

**Itfan dan Widyono Soetjipto** (Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia)

**DAMPAK KETERGANTUNGAN SOSIAL EKONOMI DESA TERHADAP LUASAN HUTAN MANGROVE DI INDONESIA**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 61-75

**Abstrak**

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai lokasi wilayah desa di sekitar/dalam kawasan hutan sebagai bukti ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan dalam memengaruhi luasan hutan mangrove di wilayah pesisir Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Menurut studi empiris yang dilakukan di Iran, India, Thailand, dan Vietnam, secara umum ketergantungan mata pencaharian pada hutan memberikan dampak negatif dalam mengurangi ekosistem hutan mangrove. Studi empiris pada level desa di Indonesia masih belum ada karena keterbatasan data. Penulis mencoba menganalisis data *panel unbalanced* dengan kombinasi data geospasial dan PODES. Menggunakan *Fixed Effects Model* (FEM) untuk menganalisis dampak dari lokasi wilayah desa di dalam kawasan hutan terhadap luasan hutan mangrove, penelitian ini menemukan bahwa desa yang wilayahnya berada di sekitar/dalam kawasan hutan memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan korelasi negatif terhadap luasan hutan mangrove di wilayah desa tersebut. Ketergantungan tersebut baik bagi perekonomian masyarakat desa, namun akan berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga diperlukan alternatif mata pencaharian di desa untuk mengurangi ketergantungan penduduk desa terhadap hutan mangrove. Pemerintah Indonesia perlu mendorong rehabilitasi mangrove untuk dikembalikan menjadi pusat ekowisata agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove.

Kata kunci: ketergantungan, sosial-ekonomi, mangrove, data panel

**Agung Riyardi dan Maulidyah Indira Hasmarini** (Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**ANALISIS TINGKAT KRIMINALITAS YANG MENGANCAM INDUSTRI MIKRO DAN KECIL**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 77-91

**Abstrak**

Berbagai penelitian telah menganalisis bahwa industri mikro dan kecil (IMK) berperan strategis dalam perekonomian, berkembang, dan memiliki berbagai kelemahan yang menyebabkan menjadi sasaran kriminalitas, namun belum menganalisis tingkat kriminalitas yang mengancam kinerja IMK. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari tingkat kriminalitas, kriminalitas yang mengancam IMK, dan kinerja IMK yang terancam kriminalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pemodelan persamaan regresi panel data fungsi produksi Cobb-Douglas IMK yang ditambahkan dengan variabel kriminalitas. Variabel yang digunakan adalah jumlah produksi, nilai tambah, jumlah produksi per tenaga kerja, nilai tambah per tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah pekerja, input, dan pengeluaran IMK untuk tenaga kerja. Variabel kriminalitas berupa jumlah kriminalitas dan risiko penduduk menjadi korban kriminalitas. Data yang digunakan adalah data IMK dan kriminalitas seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua model menggambarkan IMK terancam kriminalitas tingkat rendah sebab hanya jumlah kriminalitas yang memengaruhi kinerja IMK. Kinerja IMK yang terancam adalah nilai tambah per tenaga kerja. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan untuk mencegah meningkatnya tingkat kriminalitas melalui pengurangan jumlah kriminalitas, peningkatan nilai tambah dan produktivitas IMK.

Kata kunci: industri mikro dan kecil, fungsi produksi, tingkat kriminalitas

**Rasyid Widada, Baba Barus, Bambang Juanda, dan Sri Mulatsih** (Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) IPB)

**PENINGKATAN KEMISKINAN PERKOTAAN, SUBURBAN, DAN PERDESAAN PADA AWAL PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KENDAL**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 93-105

**Abstrak**

Pada tahap awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, Kabupaten Kendal mengalami peningkatan angka kemiskinan sebagaimana terjadi di lingkup nasional maupun global. Daerah perkotaan di Kabupaten Kendal mengalami lonjakan yang lebih tinggi sebesar 4,42 persen pada keluarga miskin dibandingkan dengan daerah perdesaan yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen. *Suburbanisasi* memainkan peran penting karena kedekatan Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Menariknya, isu-isu terkait kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah suburban. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menganalisis kemiskinan di perkotaan, suburban, dan perdesaan di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai dua tujuan: (1) menetapkan zonasi tata ruang di Kabupaten Kendal berdasarkan ketiga kategori tersebut, dan (2) menganalisis peningkatan kemiskinan pada periode awal pandemi di setiap kategori. Zonasi spasial dilakukan dengan menggunakan teknik *K-Means Clustering*, sedangkan teknik deskriptif kuantitatif dan analisis spasial dengan *Moran Index* dan *Local Indicators of Spatial Autocorrelation* (LISA) digunakan untuk analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi komposisi rumah tangga miskin secara berbeda di perkotaan, suburban, dan perdesaan. Selain itu, analisis mengungkapkan bahwa kemiskinan cenderung mengelompok di daerah suburban Kabupaten Kendal.

Kata kunci: kemiskinan, perkotaan, suburban, perdesaan, Covid-19

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 14, NO. 1, JUNI 2023

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

**Vita Kartika Sari** (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret) dan **Yozi Aulia Rahman** (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang)

**DETERMINANT OF DOMESTIC INVESTMENT REALIZATION IN INDONESIA: A DYNAMIC PANEL ESTIMATION**  
JEKP, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 1-13

## **Abstract**

*Investment becomes an important variable to achieve economic growth, especially in a developing country such as Indonesia. Investment is a tool for economic growth and recovery through capital stimulus for the production process that will be impactful on increasing household consumption. Investment can contribute to job creation, poverty reduction, and living standard improvement. Enhancement of domestic investment is needed to improve the development. The main purpose of this study is to analyze the effects of gross regional domestic product (GRDP), government spending, and years of schooling on the realization of domestic investment in 33 provinces in Indonesia from 2016 to 2020. The realization of domestic investment in Indonesia showed a positive trend that described a good indicator of investment growth in provincial level. Data estimation employed with first difference panel generalized method of moments. From the test results, the GRDP parameter is significantly positive towards domestic investment. Years of schooling is proven to have negative impacts on the realization of domestic investment. GRDP(-1) and government spending are proven to be not significant. The instrument validity test employing the Sargan test shows that the research model is valid. Through the Arellano-Bond Serial Correlation test, it is known that there is no serial correlation so that the model has good consistency. Therefore, investment policy stability is necessary to encourage the productivity of the productive sectors at the provincial level. Synergy between the central government and provincial government is needed to allocate the realization of domestic investment efficiently for the potential sectors.*

*Keywords: domestic investment, gross regional domestic product, GMM panel*

Sifa Rofatunnisa dan Hardius Usman (Politeknik Statistika STIS)

**ACHIEVEMENTS OF INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH AND GENDER INEQUALITY IN INDONESIA:  
PANEL-SIMULTANEOUS EQUATION ANALYSIS**

JEKP, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 15-32

**Abstract**

Indonesia is still facing the problem of reducing poverty and income inequality which did not show significant changes during 2015-2019. Achieving gender equality is one of the strategies that can help to achieve inclusive economic growth. Based on the Human Development Report, Indonesia is ranked 4th with the highest Gender Inequality Index in ASEAN countries. This study aims to analyze the impact of gender inequality in education and employment on achieving economic growth inclusiveness by analyzing the simultaneity pattern between four indicators of inclusive growth: economic growth, poverty rates, employment opportunities, and income inequality, in Indonesia during 2015-2019. The estimation method used in this study is EC2SLS. The pattern of simultaneity gives the conclusion that economic growth in Indonesia is not yet inclusive. The estimation results show that the ratio of the average years of schooling of female to male and the average of women's earnings significantly increases economic growth. The ratio of labor force participation rate significantly increases employment opportunities, the ratio of literacy rate significantly reduces poverty. The ratio of the gross participation rate at the tertiary level significantly reduces income inequality, the ratio of the net participation rate at the junior high school level significantly increases income inequality.

Keywords: inclusive economic growth, gender inequality, simultaneous equality, EC2SLS

Fajri Ramadhan dan Khoirunurrofik (Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia)

**ACCOUNTABILITY AND FINANCIAL CONDITION OF SPECIAL REGION OF ACEH, PAPUA,  
AND WEST PAPUA PROVINCE**

JEKP, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 33-45

**Abstract**

This study aims to examine the relationship between the financial condition of the three special autonomous regions, Aceh, Papua, and West Papua with regional financial accountability as proxied by the opinion variable on regional financial statements audited by BPK RI. Using Conditional Logistic Fixed Effect method, the study uses financial ratios based on regional financial data from 2011-2019. The result of the study is that there is a relationship between accountability and financial condition of the special autonomy regional government. Variable of Special Allocation Fund (DAK) divided by total transfer is consistent to enhance accountability. The ratio of Revenue Sharing (DBH) per total income, operating and capital expenditures per total expenditure are consistent and significant in reducing the possibility of an Unqualified Opinion (WTP). All of these findings are in line with the development of calculations that use an ordered logit marginal effect to see the percentage of possible occurrences of opinions and their relationship to various ratios that become research variables. Various findings based on data processing and marginal effect calculations indicate that there is a need to revise DBH policies and regional expenditures, and the application of DAK in regions that have not yet received a WTP opinion.

Keywords: asymmetric decentralization, local financial condition, accountability

**Ari Mulianta Ginting** (Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI)

**THE ROLE OF THE SPECIAL AUTONOMY FUND TO IMPROVE THE PUBLIC SERVICE IN THE PAPUA PROVINCE**  
JEKP, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 47-59

**Abstract**

*This paper examines the special autonomy fund's role in public service in health and education sector in districts/cities in Papua Province. Using panel data from 29 districts/cities in Papua Province covering 2013-2020, our findings are based on panel data. The special autonomy fund has a positive and significant impact on public service in health and education sector in districts/cities in Papua Provinces. Moreover, we identify that fiscal decentralization also positively and significantly affects public service in districts/cities in Papua Province. A special autonomy fund is a necessary condition for increasing public service. There are requirements to implement the special funding for Papua, such as participation of the people in determining and supervising the use of the special fund, accountability of local government to use the special fund, synergy, and coordination among stakeholders in Papua. Finally, the central government must ensure that special funds must be allocated to public services such as health and education sector. Indonesian Parliament should make an evaluation and monitoring of the special autonomy fund for Papua Province. The evaluation and monitoring of the special autonomy fund are needed in order to fulfill the aims of the fund.*

*Keywords: fiscal policy, public economics, regional autonomy, special autonomy fund, public service*

**Itfan dan Widyono Soetjipto** (Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia)

**IMPACTS OF VILLAGE SOCIO-ECONOMIC DEPENDENCE ON MANGROVE FOREST AREAS IN INDONESIA**  
JEKP, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 61-75

**Abstract**

*This study aims to find empirical evidence regarding the location of village areas around/within the forest as evidence of population dependence on forest areas in influencing mangrove forests in coastal regions of Indonesia. The motivation for this study is that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in last three decades. According to empirical studies in Iran, India, Thailand, and Vietnam, livelihood dependence on forests has a negative impact on reducing mangrove forest ecosystems. There are no empirical studies at the village level in Indonesia due to limited data. The author tried to analyze unbalanced panel data by combining geospatial data and PODES. Using FEM to analyze the impact of the location of village areas within the forest area on mangrove forests, it found that villages whose areas are around the forest have a high dependence on natural resources and a negative correlation to the area of mangrove forests. This dependence is good for the economy of rural communities but have a bad impact on the environment. Alternative livelihoods are needed to reduce villagers' dependence on mangrove forests. The Government of Indonesia needs to encourage mangrove rehabilitation to become an ecotourism center to increase the income of people around mangrove forests.*

*Keywords: dependence, socio-economic, mangrove, panel data*

**Agung Riyardi dan Maulidyah Indira Hasmarini** (Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**ANALYSIS OF THE CRIME LEVEL FACED BY MICRO AND SMALL INDUSTRIES**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 77-91

**Abstract**

*Various studies have analyzed that micro and small industries (IMK) play a strategic role in the economy, grow, and have various weaknesses that cause them to become targets of crime, but have not analyzed the crime level that threatens IMK's performance. The purpose of this research is to study the crime level, crime that threatens IMK, and IMK's performance threatened by crime. The research method is panel data regression equation modeling of the crime extended IMK Cobb-Douglas production function. The variables are total production, value added, total production per worker, value added per worker, number of companies, number of workers, inputs, and expenditures for workers. The criminality variables are the amount of crime and the risk of the population becoming victims of crime. The data used are IMK and criminality data for all provinces in Indonesia from 2017 to 2020. The result shows that all models depict IMK as threatened with low-level crime because only the crime's number affects the IMK's performance. The IMK's performance threatened by crime is the value added per worker. Based on these results, it is recommended to prevent the crime level increasing by reducing the number of crimes, increasing value added and productivity of IMK.*

*Keywords: micro and small industries, production function, crime level*

**Rasyid Widada, Baba Barus, Bambang Juanda, dan Sri Mulatsih** (Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD) IPB)

**ANALYSIS OF THE INCREASE OF URBAN, SUBURBAN, AND RURAL POVERTY AT THE BEGINNING OF COVID-19 PANDEMIC IN KENDAL REGENCY**

*JEKP*, Vol. 14, No. 1, Juni 2023, hal. 93-105

**Abstract**

*In 2020, during the early stages of the Covid-19 pandemic, Kendal Regency witnessed an increase in poverty rates as both national and global levels. Urban areas in Kendal Regency experienced a higher surge of 4.42 percent in low-income families compared to rural areas, which saw only a 0.43 percent increase. Suburbanization played a significant role due to Kendal Regency's proximity to Semarang City, the capital of Central Java Province. Interestingly, poverty-related issues were more prevalent in suburban areas. Consequently, a study was conducted to analyze poverty in urban, suburban, and rural areas in Kendal Regency. The research aimed to achieve two objectives: (1) establish spatial zoning in Kendal Regency based on the three categories, and (2) analyze the increase in poverty during the early period of the pandemic in each category. Spatial zoning was performed using the K-Means Clustering technique, while descriptive quantitative techniques and spatial analysis with the Moran Index and Local Indicators of Spatial Autocorrelation (LISA) were used for analysis. The results indicated that the Covid-19 pandemic affected the composition of poor households differently across urban, suburban, and rural areas. Additionally, the analysis revealed that poverty tended to cluster in suburban areas of Kendal Regency.*

*Keywords: poverty, urban, suburban, rural, Covid-19*